

## ABSTRAK

**Shofi Hatul Fitria:** *Relevansi Fatwa MUI NO.7 Tahun 2000 Dengan UU NO.39 Tentang Penetapan Dan Perlindungan TKI Tahun 2000 Pasal 77-84*

Bekerja menjadi TKW adalah pilihan menurut sebagian perempuan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian banyaknya kasus tentang TKW di luar negeri membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwanya di dalam Fatwa MUI menerangkan bahwa perempuan yang meninggalkan keluarganya untuk bekerja pada prinsipnya boleh sepanjang di sertai mahram, jika tidak di sertai mahram hukumnya haram, kecuali benar-benar dalam keadaan darurat. MUI meminta kepada pemerintah dan lembaga yang terkait dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan TKW. Dan di dorong dengan adanya UU NO.39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI, tetapi di dalam UU ini hanya membahas tentang bagaimana prosedur untuk mendapatkan perlindungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) untuk mengetahui bagaimana konsep tenaga kerja wanita menurut Fatwa MUI NO.7 tahun 2000 dan Undang-Undang NO.39 pasal 77-84 (2) untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Fatwa MUI NO.7 tahun 2000 dan Undang-Undang NO.39 pasal 77-84 tahun 2004 (3) untuk mengetahui Relevansi Fatwa MUI NO.7 tahun 2000 dan Undang-Undang NO.39 pasal 77-84 dalam perlindungan hukum tenaga kerja wanita

Penelitian ini mengacu pada konsep darurat, darurat adalah seseorang yang di perbolehkan untuk melakukan sesuatu yang di larang dalam menyelamatkan jiwa dari kematian, atau limit akhir keterpaksaan yang tidak menerjang sesuatu mesti dilarang mengancam jiwa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu yang mengetahui tujuan penelitian atau rumusan masalah, Jenis penelitian ini yang di gunakan yaitu deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan secara spesifik, dan analisis merupakan proses analisis di mana data yang di kumpulkan lalu di proses. Dengan menjelaskan relevansinya fatwa MUI dan Undang-Undang

Hasil penelitian ini menunjukkan 1). MUI membolehkan pengiriman TKW karna konsep darurat yang membolehkan sesuatu yang haram. 2). Menjadikan Al-Qur'an, Hadist dan Kaidah fiqh sebagai pertimbangan hukum untuk merealisasikan upaya kemaslahatan umat.. 3). Relevansi dari kedua fatwa MUI dan Undang-Undang, UU adalah suatu bentuk dari Qonuniy yang membahas bagaimana prosedur untuk mendapatkan perlindungan

**Kata Kunci :** Pengiriman TKW, Penetapan dan Perlindungan, Fatwa MUI dan Undang-Undang



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG